

**1. LADANG PORANG PAMAN LIMBAD**

Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan  
Penanaman Modal Secara Online Tanpa Batas  
Waktu

**2. JUKUNG SITEPAT PANJI**

JempUt, KUnjuNGi dan awaSI, TEraPi obAT PASieN  
Jlwa

# Laporan Penelitian

## MONITORING DAN EVALUASI INOVASI

---



BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT maha pencipta atas limpahan karunia-Nya, **LAPORAN PENELITIAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan pelaksanaan/ implementasi inovasi-inovasi di Kabupaten Balangan tahun 2021-2022, kendala dan permasalahan yang dihadapi selama implementasi program inovasi, mengukur efisiensi/ keberhasilan program dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi program inovasi.

Penelitian ini disadari oleh penyusun masih banyak kekurangan karena keterbatasan tools/ alat/ metode dan indikator yang digunakan untuk mengukur, serta waktu pengukuran yang relatif masih singkat karena program baru berjalan selama 2 tahun. Alangkah baiknya kedepannya ditambahkan lagi indikator pengukuran dan waktu evaluasi supaya lebih terlihat lagi dampak dan manfaatnya (*impact*). Keterbatasan juga terjadi pada internal penyusun berupa waktu dan kemampuan, sehingga penyusun sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata penyusun menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada seluruh pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penelitian ini. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Balangan, Desember 2022

Tim Penyusun

JF Peneliti Bappedalitbang

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Inovasi sektor publik .....	6
B. Evaluasi Dampak .....	7
C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik.....	10
D. Kerangka Pikir.....	14
E. Operasionalisasi Konsep.....	15
III. METODE .....	18
A. Pendekatan Penelitian.....	18
B. Teknik Pengumpulan Data .....	18
C. Instrumen pengukuran.....	19
D. Kriteria Penentuan Sampling.....	19
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	20
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	23
1. LAYANAN PENDAMPINGAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL ONLINE TANPA BATAS WAKTU (LADANG PORANG PAMAN LIMBAD).....	23
2. JEMPUT, KUNJUNGI DAN AWASI, TERAPI OBAT PASIEN JIWA (JUKUNG SITEPAT PANJI).....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output .....	14
Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi.....	15
Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut .....	20
Tabel 4. Perubahan Inovasi LADANG PORANG PAMAN LIMBAD .....	25
Tabel 5. Perubahan Inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI .....	32

# I. PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang diusung adalah

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Strategi yang diambil adalah

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
4. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
6. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
7. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
8. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
9. Optimalisasi pengelolaan kenakeragaman hayati
10. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
11. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
12. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
13. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi
14. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
15. Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
16. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
17. Meningkatkan Usia Harapan Hidup

18. Menurunkan Angka Kematian Ibu
19. Menurunkan Angka Kematian Bayi
20. Menurunkan Prevalensi Stunting
21. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
22. Meningkatkan nilai SAKIP
23. Mempertahankan Opini BPK
24. Meningkatkan nilai EKPPD
25. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publ
26. Meningkatkan Indeks Kepuasan
27. Penurunan angka kemiskinan
28. Meningkatkan Angka PPKS yang tertangani
29. Mempertahankan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
30. Meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
31. Menurunkan Indeks Resiko Bencana
32. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
33. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa program prioritas yakni sebagai berikut

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Inovasi daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria inovasi daerah harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

- e. Dapat direplikasi
- f. Inovasi dibagi menjadi inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi daerah lainnya.

Tujuan inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Prestasi inovasi Kabupaten Balangan adalah pada tahun 2021 nilai indeks inovasi daerah adalah 42,62 (inovatif), tahun 2022 meningkat menjadi 57,57 (inovatif). Namun untuk peringkat meningkat cukup tinggi yakni dari peringkat 166 menjadi peringkat 45 dari 508 kabupaten/ kota di Indonesia. Peningkatan prestasi yang cukup signifikan ini diperoleh dari peningkatan metode penjangkaran inovasi daerah, pendampingan monitoring evaluasi pengisian data dukung kelengkapan inovasi sesuai indikator parameter Kemendagri, dan peningkatan kapabilitas dan keterampilan SDM inovasi (tim Klinik Inoba, Pamong Inovasi, Inovator dan Admin inovasi).

Monitoring dan evaluasi implementasi program menjadi salah satu indikator penilaian inovasi daerah, sebagaimana diketahui dalam juknis terbaru Kementerian Dalam Negeri bahwa indikator monitoring evaluasi mengukur kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah, dilihat dari a) hasil laporan monitoring evaluasi internal perangkat daerah, b) hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat, c) hasil laporan monitoring evaluasi eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis.

Keberhasilan program dapat diukur dengan cara a) menetapkan tujuan dan indikator sebagai alat ukur untuk masing-masing tujuan tersebut, b) Mengumpulkan data berupa angka statistik, survei, wawancara, atau informasi lain yang relevan dengan tujuan program, c) Analisis Data untuk mengevaluasi hasil program, d) Evaluasi Kualitatif untuk mendapatkan umpan balik dari peserta program, stakeholder, atau pihak terkait melalui metode wawancara, tinjauan literatur, atau diskusi kelompok, e) Bandingkan data dan temuan dengan target yang telah ditetapkan, apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau memenuhi harapan yang diharapkan, jika ada ketidaksesuaian, identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut, f) Perbaiki dan pelajari hasil evaluasi program untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program di masa depan.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi implementasi program inovasi adalah a) mengukur keberhasilan implementasi program inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, b) mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data pada aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, c) mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk inovasi, melibatkan pengukuran biaya, waktu dan sumber daya

untuk pelaksanaan inovasi, c) melingkarkan pembelajaran organisasi karena hasil analisis dan temuan inovasi mengidentifikasi rekomendasi untuk membantu mengubah budaya dan proses organisasi untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, d) mendukung pengambilan keputusan karena evaluasi program inovasi menyediakan informasi penting yang dapat dipergunakan pengambil keputusan terkait pengembangan dan inventarisasi di bidang inovasi.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penelitian evaluasi implementasi inovasi daerah untuk mengukur keberhasilan, efisiensi dan efektivitas program inovasi guna memberikan masukan bagi pengembangan dan keberlanjutan implementasi program inovasi.

## **B. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah mengetahui efisiensi dan efektivitas implementasi program inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu kemudahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Balangan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebagai salah satu dampak dari implementasi inovasi dilihat dari tahap input, proses, output dan dampak
2. Mengetahui kelemahan/ hambatan/ kendala yang dihadapi dalam implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
3. Aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan sebagai dampak dari implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya SKPD, BLUD dan UPT Puskesmas yang telah melaksanakan inovasi terkait dengan implementasi program inovasi yang selama ini telah dilaksanakan
2. Mengetahui dan memberikan informasi mengenai area perbaikan inovasi di sektor publik
3. Teridentifikasinya aspek-aspek yang mempengaruhi capaian dampak inovasi dan rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program inovasi



#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Lokus pelaksanaan penelitian evaluasi dampak Inovasi adalah di Kabupaten Balangan khususnya terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi bentuk lainnya yang menjeri urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

- a. Inovasi pelayanan publik yakni inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik
- b. Inovasi tata kelola pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- c. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (berdasarkan PP nomor 38 tahun 2017 pasal 5 tentang inovasi daerah).

Inovasi yang menjadi obyek penelitian adalah inovasi yang telah dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun rentang tahun 2021 sampai 2022.

Pengukuran dampak dilakukan pada level mikro, yaitu pengukuran dampak inovasi pada tataran output yang dihubungkan dengan ada tidaknya perubahan yang terjadi dari setiap pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya.

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah

- a. Identifikasi perubahan sebelum dan setelah implemenasi inovasi
- b. Identifikasi faktor kelemahan/ hambatan/ kendala implementasi inovasi
- c. Menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi inovasi

## II. TINJAUAN PUSTAKA

---

### A. Inovasi sektor publik

Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses perubahan perilaku. Inovasi bergerak dalam ruang yang dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Everett M Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Begitu halnya dengan pandangan Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) yang secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru (*invention*) yang bermanfaat. Mendefinisikan inovasi di sektor publik tidaklah sama dengan mendefinisikan inovasi di sektor privat. Inovasi tidak hanya menyangkut sesuatu yang baru, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk proses ataupun output dari suatu peoduk jasa/barang. Karena itulah, maka definisi sederhana dari inovasi sektor public adalah tentang bagaimana ide-ide baru itu bekerja untukmenciptakan nilai publik (OECD, 2014). Adapun karakteristik inovasi di sektor publik (OECD Observatory) adalah sebagai berikut:

1. **Kebaruan:** inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
2. **Implementasi:** inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
3. **Dampak:** inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna atau karyawan.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dinyatakan bahwa “Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah”. Selanjutnya dinyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi Pelayanan Publik, yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## **B. Evaluasi Dampak**

Dampak adalah hasil jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program, proyek atau kebijakan, termasuk hasil yang diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, dampak positif dan negatif, serta dampak langsung dan tidak langsung (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*). Identifikasi dampak ini bertujuan untuk melihat perbedaan utama dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan. Hal ini pula, yang oleh *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* ikut mendefinisikan dampak sebagai cara untuk melihat pencapaian tujuan proyek atau program, atau lebih tepatnya terkait dengan kontribusi untuk pencapaian tujuan yang dilakukan yang keseluruhannya dapat ditempuh melalui satu instrumen pelaksanaan bernama impact evaluation atau evaluasi dampak.

Evaluasi dampak merupakan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Proses ini akan menentukan apakah suatu intervensi telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi dampak ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil, bagaimana, untuk siapa, dan mengapa hal itu terjadi (*Impact Evaluation: A discussion paper for AusAID practitioners, 2012*). Evaluasi dampak dapat memberikan bukti secara nyata tentang dampak yang telah diproduksi (dampak yang diharapkan). Selain bukti yang kredibel tersebut, evaluasi dampak juga dapat mengarahkan pada inferensi kausal bahwa terjadinya perubahan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan proyek, program atau kebijakan. Maka dari itu, Evaluasi dampak dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek/kebijakan dan merupakan hasil dari kegiatan program/ proyek/ kebijakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28), menyebutkan ada empat jenis evaluasi dampak yaitu :

1. Evaluasi *single program after-only*. Jenis evaluasi ini merupakan yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya suatu program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.
2. Evaluasi *single program before-after*. Jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut

3. Evaluasi *comparative after-only*. Merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui
4. Evaluasi *comparative before-after*. Merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Selain itu, ada pula jenis evaluasi dampak yang digunakan sebelum dan sesudah dan selama program dilaksanakan (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*) yaitu :

1. *Ex post impact evaluation*, mengumpulkan data terkait actual impact
2. *Ex ante impact evaluation*, meramalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi
3. *During implementation*, mengumpulkan data tentang kesesuaian dampak program yang dihasilkan dengan dampak yang diinginkan.

Patton dan Sawicky menguraikan 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program, yaitu :

1. *Before and after comparisons*,

Pendekatan yang membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum dan sesudah program (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program dijalankan (*actual postprogram data*) dengan masyarakat yang tidak menjalankan program atau kebijakan tersebut.

2. *With and without comparisons*.

Pendekatan untuk membandingkan antara grup target yang menerima program dan yang tidak. Adapun batasan-batasan antara pendekatan ini dan pendekatan pada nomor satu diatas adalah perlunya pemilihan kelompok yang akan dibandingkan dengan tepat, adanya asumsi bahwa perubahan-perubahan yang diamati di tempat kejadian perkara dapat dikenali.

3. *Actual-versus-planned performance comparisons*.

Pendekatan ini membandingkan data pasca pelaksanaan program secara aktual pada sasaran program yang timbul pada periode waktu sebelumnya (biasanya sebelum implelementasi program). Analisis menentukan tujuan dan target yang spesifik untuk membuat kriteria evaluasi sebelum program dilaksanakan guna mengetahui periode waktu pelaksanaan program dan menentukan data yang dibutuhkan dari performa program yang dilaksanakan analisis dalam hal ini membandingkan performa kebijakan secara actual terhadap kondisi masyarakat yang tidak menerima program.

#### 4. *Experimental (controlled) models*

Pendekatan ini menggunakan konsep kontrol ekuivalen dan kelompok yang diuji cobakan serta ukuran-ukuran pra dan pasca pelaksanaan program. Unit analisis adalah individu dalam kelompok yang dipilih secara acak. Individu yang dimaksud adalah yang menerima atau melaksanakan program dan tidak atau melaksanakan program yang berbeda dengan kelompok yang dijadikan kelompok uji coba.

#### 5. *Quasi-experimental models*

Pendekatan *Quasi-experimental models* mencoba mengukur hasil atau outcome dari program atau kebijakan melalui skor, angka atau indikator lainnya. Selain itu pendekatan ini juga mencoba untuk mempertahankan logika percobaan tanpa menggunakan suatu prosedur, teknik ataupun hal lainnya. Pendekatan ini memiliki 2 rancangan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hasil pelaksanaan program terhadap target grup, yaitu rancangan non equivalent control group dan rancangan interrupted time-series design. Rancangan non equivalent control group melakukan perbandingan dari treatment group dan grup lainnya yang diujicobakan program, baik sebelum dan sesudah kebijakan atau program dilaksanakan. Adapun rancangan yang kedua melakukan perbandingan treatment grup dari waktu ke waktu baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Misalnya kondisi kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan program diamati beberapa kali.

#### 6. *Cost-oriented approaches*

Pendekatan Cost-oriented approaches merupakan jawaban atas kondisi yang mengharuskan mengukur dampak kebijakan dalam satuan uang, estimasi biaya dan keuntungan bersih dari perubahan yang terdeteksi dari pelaksanaan program, mengukur keuntungan yang terlihat maupun tidak serta biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung atau uang, maupun tidak langsung (dampak buruk yang akan dirasakan kedepannya).

Kajian The World Bank tahun 2006 tentang *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time And Data Constraints* mengemukakan bahwa ada berbagai pilihan desain evaluasi dampak dimulai dari metode yang terkuat hingga lemah yaitu:

##### 1. *Pre- and post intervention project and control group design with randomized or non-randomized assignment.*

Desain ini merupakan desain evaluasi paling kuat yang mengkombinasikan evaluasi pre and post intervention dengan menggunakan data awal/dasar dan melibatkan perbandingan antar kelompok.

2. *Delayed pre-test/post-test comparison group design.*

Desain ini bermanfaat ketika proses evaluasi dimulai dalam jangka menengah. Hal ini karena desain ini tidak menggunakan data awal/dasar (baseline), namun lebih pada penguatan evaluasi mid-term dan post intervention.

3. *Pre-and post-intervention project group and post-intervention comparison group.*

Meskipun desain ini lebih lemah dari sebelumnya, namun desain ini memungkinkan untuk melihat perbandingan dari waktu ke waktu dan analisis transversal pasca proyek. Dalam desain ini tidak menggunakan preintervention terkait perbandingan kelompok, tetapi hanya menggunakan post-intervention.

4. *Post-intervention project and comparison groups with no baseline data.*

Desain evaluasi ini hanya memfokuskan pada evaluasi dampak terhadap post-intervention data proyek dan perbandingan antar kelompok dan tanpa menggunakan baseline data.

5. *Pre- and post-implementation project group analysis with no comparison group*

Desain ini menghilangkan analisis terhadap evaluasi dampak dengan kelompok pembanding, namun tetap menggunakan pre and post intervention untuk proyek kelompok dan baseline data.

6. *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group.*

Ini merupakan desain evaluasi yang paling lemah karena memfokuskan proses evaluasi post intervention tanpa pre-intervention dan berdasarkan baseline data.

### **C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik**

Pengukuran dampak inovasi sektor publik cenderung lebih sulit daripada sektor privat (NESTA, 2011). Hal ini karena pengukuran di sektor publik tidak hanya dilakukan dari output keuangan semata, namun juga pada nilai publik yang dihasilkan. Menurut kajian NESTA, indeks inovasi sektor publik setidaknya mencakup empat bidang, yaitu :

1. *Improvement in organisational key performance indicators*
2. *Improvement in service evaluation*
3. *Improvement in efficiency*
4. *Improvement context*

Salah satu pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di sektor publik misalnya dalam *Innovation in Public Sector Organisations, A Pilot Survey in measuring innovation across the public sector* yang dilakukan oleh *National Endowment for Science, technology, and the Arts (NESTA) of United Kingdom* pada tahun 2011. Survey ini menjadi stimulus untuk membuat indeks pengukuran inovasi organisasi

sektor publik yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan sektor publik. Jenis pengukuran inovasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah inovasi berupa jasa (dalam penelitian ini jasa dalam bidang kesehatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, indikator yang digunakan dalam kuesioner ini adalah mengadopsi *Private Sector Index Survey*. Adapun indikator-indikator tersebut berupa :

1. *Efficiency*, terkait dengan efisiensi biaya yang terjadi setelah adanya inovasi
2. *Quality*, terkait dengan kualitas dari layanan inovasi.
3. *Access to service*, terkait dengan akses pelayanan yang semakin mudah atau malah justru semakin sulit.
4. *Customer Feedback*, terkait dengan apakah terdapat ruang bagi konsumen untuk memberikan feedback dalam rangka peningkatan inovasi.
5. *Speed Of Delivery*, terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu layanan tertentu.
6. *Range Of Services*, terkait dengan seberapa jauh jangkauan pelayanan yang diberikan setelah inovasi.

Pengukuran dampak inovasi sektor publik lainnya juga dilakukan SEAT (*Socio Economic Assessment Toolbox*) yang merupakan sebuah perangkat penelitian yang digagas oleh *Government and Social Affairs*, Pemerintah Inggris pada tahun 2012 untuk menilai seberapa besar dampak dari sebuah inovasi kebijakan pemerintahan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang diafirmasikan ke dalam kebijakan ini. Penelitian tersebut menilai dengan cara yang holistik dengan asumsi bahwa kelima indikator bisa sesuai dengan tahapan implementasi inovasi. Pada studi kasusnya, kebijakan pemerintah Inggris yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok pekerja yang berlatar belakang Anglo American, untuk bisa diakselerasi tingkat perekonomian di daerah dekat pertambangan, sekaligus mengubah sosial-kultural masyarakat yang pasif akan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan metode kualitatif, dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan kelompok pekerja tersebut. Tujuan FGD tersebut yaitu untuk menilai seberapa jauh indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. *Inform*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan awareness
2. *Consult*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan pemahaman.

3. *Involve*, Melibatkan secara langsung stakeholders dengan tujuan mendapatkan feedback dan alternative inovasi.
4. *Collaborate*, Merumuskan sebuah inovasi bersama stakeholders dengan menjamin berjalannya aspirasi, ide, dan gagasan.
5. *Empower*, Memberdayakan secara mandiri stakeholders untuk dapat menjalankan inovasi dengan tujuan sustainability.

Di berbagai negara, pengukuran dampak inovasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. TEKES (*The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation*) yang merupakan sebuah badan atau organisasi di Finlandia turut serta berkontribusi dalam melakukan berbagai pengukuran dampak inovasi yang bidangnya fokus pada *financing research, development and innovation*. TEKES saat ini telah mendukung berbagai kegiatan inovasi yang luas di bidang riset, industri dan sektor jasa. Tujuannya agar program bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu indikator pengukuran dampak inovasi yang dihasilkan bernama Tekes Model. Tekes model ini pernah digunakan oleh beberapa organisasi yang juga bergerak disektor pengembangan inovasi khususnya pada sektor privat yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, seperti *GAP (Global Access Program)* di *University of California* dan VINNOVA yang merupakan organisasi di Swedia yang berfokus pada pengukuran dampak pertumbuhan berkelanjutan di Swedia.

TEKES mengembangkan sebuah *General logic model for innovation* yang didalamnya mengukur dampak inovasi. Model ini membagi dampak inovasi kedalam tiga garis besar yaitu *immediate Impacts, Intermediate Impacts* dan *Ultimate Impacts*.

#### 1. *Immediate Impacts*

*Immediate impacts* menekankan pada konteks *increased resources or capabilities*. Dari konteks ini dapat dijabarkan sejumlah indikator berdasarkan pada ide/gagasan inovasi yang dikembangkan. Berikut indikatornya:

- *Information and advice*  
Dampak ini berfokus bagaimana kemampuan inovasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu *feedback* terhadap penyelenggara inovasi yang dinamakan sebagai *advice* (saran).
- *Competence*  
Indikator ini berfokus pada sejauh mana inovasi telah menghasilkan peningkatan kemampuan dan keahlian pada individu atau masyarakat.
- *On raising capital / Strengthened Resource*



Terkait dengan peningkatan modal dan penguatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah

- *Business linkages with service providers*

Jika dalam sector privat menekankan pada bagaimana hubungan bisnis dengan penyedia layanan, maka untuk sektor publik dapat menekankan pada hubungan penyedia layanan dan masyarakat terkait dengan program inovasi.

- *On selling in new markets*

Inovasi dapat berdampak pada terbukanya jaringan pasar/markets baru bagi masyarakat sebagai akibat dari program inovasi

## 2. *Intermediate Impacts*

Kunci utama dari *Intermediate impacts* menekankan pada *improved performance*. Indikator ini bertumpu pada konteks peningkatan kinerja sebagai bagian dampak inovasi. Adapun indicator yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *Increased revenues*

Terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata baik individu atau masyarakat

- *Increased employment*

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang lebih luas.

- *New products and service*

Dampak inovasi terkait dengan adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Begitu halnya dengan kualitas pelayanan yang lebih mudah, murah, nyaman, tidak berbelit-belit, dapat diakses, dan sebagainya.

- *Productivity*

Dampak inovasi terkait dengan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dalam masyarakat

- *Reduced environmental impact*

Kemampuan inovasi terkait juga pada sejauh mana inovasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat mungkin menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang.

- *Increased investment and collaboration*

Inovasi dapat menyebabkan peningkatan investasi atau penanaman modal dan juga pihak lain untuk turut terlibat berkolaborasi terhadap program inovasi

- *Renewal of Business/organizational structures*

Terkait dengan proses perubahan dan pembaharuan struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi yang sesuai dengan konteks program inovasi

### 3. *Ultimate Impacts*

*Ultimate Impacts* menekankan pada konteks *socio-economic benefit* yang dihasilkan oleh program inovasi. Adapun sejumlah indikator yang dapat dijabarkan berupa :

- *Sustainable wealth and job*  
Terjadi peningkatan kekayaan dan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan
- *Environmental and health care improvement*  
Terciptanya lingkungan yang nyaman dan perbaikan serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
- *Regional Viability/vitality*  
Inovasi berdampak pada meningkatnya angka harapan/kesempatan hidup di suatu wilayah atau daerah
- *Safety and security*  
Dampak inovasi terkait dengan rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat
- *Social well-being*  
Inovasi memberikan dampak pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### D. Kerangka Pikir

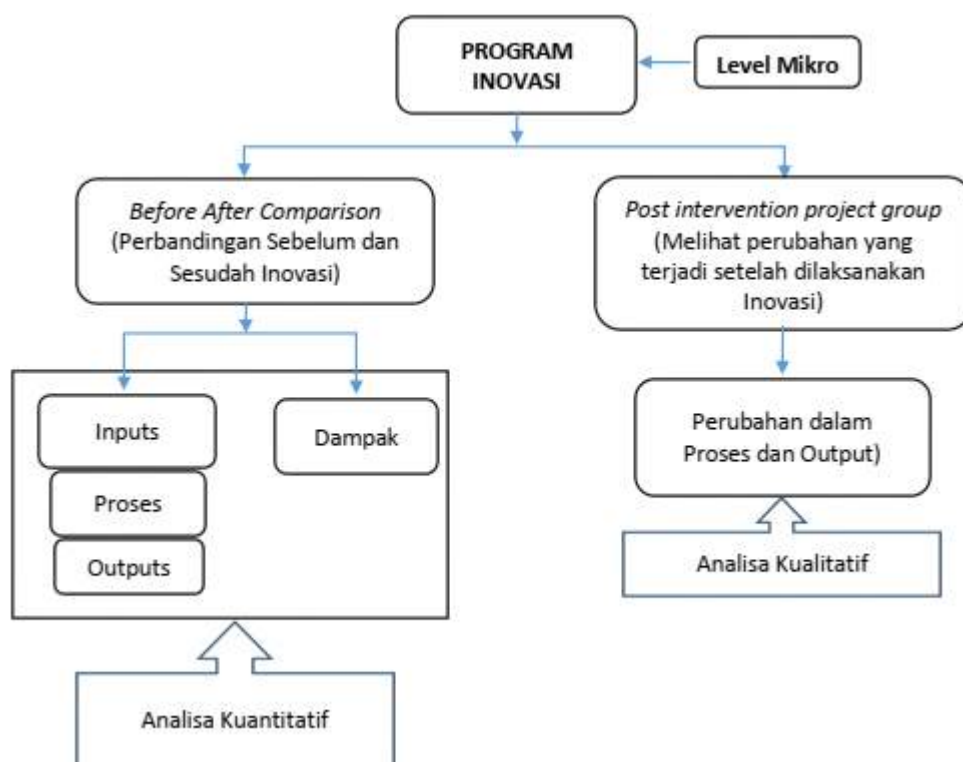
Pengukuran dampak inovasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu program inovasi yang telah berjalan. Dalam pelaksanaan ini, pendekatan evaluasi yang digunakan menggunakan pendekatan *before after comparison* (Patton and Sawicky) yang dikombinasikan dengan pendekatan *Post intervention project group without baseline data or a comparison group* (World Bank). Pada pendekatan *before after comparison*, program inovasi akan diukur dengan membandingkan kondisi sebelum inovasi dan sesudah inovasi dilaksanakan. Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group*, pendekatan evaluasi yang langsung memfokuskan pada ada/tidaknya perubahan yang ditimbulkan dari suatu proses tanpa melibatkan penggunaan baseline data ataupun perbandingan antar grup dalam proses pengukuran dampak inovasi. Pendekatan *before after comparison*, dioperasionalkan dengan menggunakan perbandingan kelompok indikator seperti: **input dengan input, proses dengan proses, dan output dengan output**. Indikator dalam masing-masing kelompok, adalah:

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output

INPUT	PROSES	OUTPUT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya/anggaran/dana;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia;</li> <li>3. Kelengkapan yang menjadi pendukung proses.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme/ prosedur yang dilakukan;</li> <li>2. Waktu layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktivitas;</li> <li>2. Kualitas hasil</li> </ol>

Pendekatan Post-intervention project group without baseline data or a comparison group diukur berdasarkan pada **dampak/perubahan yang terjadi** (yang langsung bisa dilihat dari data atau wawancara/testimoni). Pendekatan ini digunakan terhadap kondisi perubahan yang dirasakan oleh pelaku ataupun pihak lain, namun tidak memiliki data sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil pengukuran dari pendekatan ini lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada deskripsi hasil wawancara atau testimoni. Alur pikir untuk melakukan pengukuran dampak inovasi ini, digambarkan dalam skema alur sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi



#### E. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka untuk mengoperasionalkan indikator-indikator pengukuran dampak inovasi ini, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk operasionalisasi konsep pengukuran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. operasionalisasi variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
Input	Biaya/ Anggaran	Biaya Langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan (biaya administrasi/ tarif layanan)
			Biaya modal yang dikeluarkan untuk usaha atau menghasilkan produk
		Biaya tidak langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan untuk memperoleh produk layanan seperti: biaya transport, akomodasi, dll.
	SDM Pelaksana	Jumlah	Jumlah SDM yg terlibat dalam penyelenggaraan layanan (jumlah pegawai yang terlibat dalam alur 1 jenis layanan)
	Kelengkapan kerja	Peralatan/ fasilitas pendukung kinerja pelayanan	Peralatan & perlengkapan yg mendukung penyelenggaraan pelayanan (komputer, mobil, atk, meja, ketersediaan ruangan atau bangunan khusus, dll)
Proses	Mekanisme	Prosedur penerapan layanan	Persyaratan mendapatkan layanan dan unit layanan yg dilalui.
		Metode mendapatkan layanan	Cara yg dilakukan untuk mendapatkan pelayanan (online/offline, pendelegasian wewenang, jemput-bola, pesan antar, dll)
	Waktu layanan	Waktu pelayanan	Seberapa lama waktu yg digunakan untuk menghasilkan pelayanan.
Output	Produktivitas	Jumlah layanan yang dihasilkan	Jumlah layanan yg dihasilkan dalam Periode waktu tertentu (perjam/hari/bulan) atau, Jumlah penerima layanan publik yang dapat dilihat dari; jumlah pemohon, jumlah pengunjung, dsb.
		Jumlah produksi usaha	Omzet produksi usaha masyarakat.
	Kualitas	Kualitas mutu layanan	Mutu produk layanan. Bisa dilihat dari kualitas produk hasil layanan; Survey Kepuasan Masyarakat; atau analisa atas tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, dan prosedur layanan
		Kualitas produk usaha masyarakat	Perubahan mutu produk usaha masyarakat (misal; kualitas rasa, pengemasan, metode pengiriman, dsb)
Dampak	Pendapatan pemerintah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah yg diperoleh dari inovasi (pendapatan daerah; pajak, retribusi masyarakat)
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah mendapatkan program inovasi (penghasilan, laba usaha)
		Perubahan kondisi kemiskinan	Perubahan indikator statistik kemiskinan di daerah tersebut.
	Penyerapan tenaga kerja	Penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg terserap setelah dilaksanakan inovasi
	Tingkat kesadaran/ perubahan pola pikir	Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan pegawai pemerintah	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan pegawai pemerintah atas suatu isu/ permasalahan di organisasi
		Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat atas suatu isu/ permasalahan di daerah.

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
		masyarakat	
	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

*Sumber : Pengukuran Dampak Inovasi, LAN, 2018*

### III. METODE

---

#### A. Pendekatan Penelitian

Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi merupakan aktivitas evaluasi dampak program inovasi yang telah diimplementasikan oleh SKPD/ Unit Kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berbasis kuantitatif dan kualitatif (eksplorasi) dengan memilih metode *before after comparison* (kuantitatif) dan *Post Test Without Comparison Group and Baseline Data* (kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori atau instrument yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian ini bersifat objektif karena aspek terpenting dalam paradigma penelitian post-positivistis adalah sikap objektif dimana peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya mengandung bias (Creswell, 2010: 10)

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :

- a. **Studi Literatur**, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.
- b. **Focus Group Discussion (FGD)**, Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik. Dalam kegiatan ini FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian instrumen pengukuran dampak inovasi dimulai dari Judul, deskripsi, kegiatan, tujuan dan manfaat, serta deskripsi before-after inovasi berdasarkan masing-masing instrumen.
- c. **Wawancara mendalam**, Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, setelah dilakukan FGD, peneliti menentukan inovasi yang dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang paling berdampak terhadap stakeholders serta menyusun pedoman wawancara.

- d. **Observasi lapangan**, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-participant. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang diukur. Pengamatan dilakukan dalam rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.

### C. Instrumen pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah:

- a. **Angket**, Angket merupakan tehnik sekaligus instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket juga digunakan sebagai panduan untuk melakukan wawancara dan observasi.
- b. **Data Sekunder**, Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

### D. Kriteria Penentuan Sampling

Sampling untuk pengukuran dampak inovasi ini, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Sampling untuk lokus dan sampling untuk jenis inovasi yang akan diukur. Penentuan sampling tersebut, didasarkan pada sejumlah kriteria seperti:

- a. Merupakan inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah yang sampai saat ini masih berjalan dan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2015-2016.
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
  - Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi, Inovasi Daerah Lainnya yaitu Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun kriteria informan dalam pengukuran dampak inovasi ini, adalah :

- a. Pelaksana inovasi, merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan baik sebelum maupun sesudah adanya inovasi, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat atau LSM.
- b. Penggagas inovasi, orang atau pihak yang pertamakali memunculkan ide/gagasan inovasinya sehingga dipanang sebagai salah satu yang paling memahami program inovasi tersebut.
- c. Jajaran pimpinan OPD yang terlibat secara langsung dalam proses inovasi di lingkungannya.
- d. Penerima atau sasaran inovasi, yaitu pihak yang terlibat sebagai pengguna atau yang terdampak dari proses inovasi. Pihak ini bisa dari unsur masyarakat ataupun unsur pemerintahan.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses dan interpretasi data dari hasil pengolahan data agar memiliki makna dan informatif. Dalam penelitian ini, semua data dan mendalam, observasi, serta studi literatur, diolah dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

**Pengolahan data** Sebelum tim pengukuran melakukan proses pengumpulan data di lapangan, terlebih dahulu ditentukan lokus dan jenis inovasi yang akan dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan sampel yang terkait dengan jenis inovasi, Tim melakukan pengklasifikasian terhadap jenis inovasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya, Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



a. Reduksi Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui FGD dan wawancara mendalam (depth interview). Hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu pengukuran dampak inovasi, yang kemudian diikuti dengan pengklasifikasian data ke dalam tiga jenis inovasi yakni jenis inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi pemberdayaan masyarakat.

b. Display Data

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data untuk proses penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara setelah pereduksian data selesai. Kemudian dirangkum secara sistematis agar mudah difahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil tentunya dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

## Teknik Analisa Data

a. *Before After Comparison*

Pendekatan untuk mengukur dampak dengan cara membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum (before) dan sesudah (after) program inovasi (actual postprogram data). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program inovasi dijalankan (actual postprogram data). Adapun cara untuk melihat dampak inovasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari indikator input, proses, dan output berdasarkan data-data sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan.

Rumus persentase perubahan :

Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut

$\left(\frac{x - y}{y}\right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila kondisi pasca inovasi lebih kecil dibandingkan sebelum inovasi, namun menunjukkan derajat nilai perubahan Positif (efektif – efisien). Misalnya: Waktu, Jumlah SDM, Biaya.
---	--

$\left(\frac{y-x}{x}\right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila nilai pasca inovasi lebih besar dibandingkan sebelum inovasi, dan menunjukkan derajat nilai perubahan Positif. Misalnya: untuk nilai Output, produksi, dsb. Atau dengan rumus:
$\left(\frac{y}{x}\right) \times 100\%$	Untuk penghitungan nilai kinerja atau produktivitasnya.
$\bar{X} \frac{I + P + O}{3} \times 100\%$	Perhitungan Dampak Program Inovasi dihitung dari rata-rata nilai dampak Input, Proses, dan Output. Penghitungan ini dilakukan apabila data dampak yang ditimbulkan tidak diperoleh di dalam data lapangan.

Keterangan :

X = Keadaan sebelum inovasi

Y = Keadaan setelah Inovasi

I = Input

P = Proses

O = Output

$\bar{X}$  = Rata - rata

*b. Post Intervention Project Group*

*Post Intervention Project Group Post-Intervention* merupakan desain evaluasi untuk mengukur dampak dengan cara menggali data setelah program dilaksanakan tanpa harus membandingkan data sebelum program dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data kualitatif seperti wawancara dengan *key informan*, FGD, data-data program, dan data statistik dari instansi inovator.

## IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

### 1. LAYANAN PENDAMPINGAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL ONLINE TANPA BATAS WAKTU (LADANG PORANG PAMAN LIMBAD)

#### 1.1 Deskripsi Inovasi

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam pendudukan untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam pendudukan untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani. Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani. Komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melayani masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi usahanya di Kabupaten Balangan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ingin

memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan investasi/penanaman modal yang dilaksanakan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dari pengukuran ini diharapkan Unit Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik. Pelayanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak hanya pada saat jam kerja yang dilakukan secara tatap muka (luring) tetapi pelayanan perizinan berusaha juga diberikan diluar jam kerja atau selama 24 (Dua Puluh Empat) jam tanpa batas waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha secara daring atau melalui Whats App (WA).

Dalam rangka mewujudkan Good Governance (pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda sehingga diperlukan sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini juga seiring dengan ketentuan PP No.12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara pada pasal 14 disebutkan tentang kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dan pada Peraturan BKPM No.6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal pasal 1 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib membuat LKPM secara berkala.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan

Proses Ladang Porang Paman Linbat sangat banyak membantu bagi pelaku usaha (investor) untuk proses pelaporan LKPM secara online dan memudahkan bagi pelaku usaha yang tidak sempat atau sibuk bekerja bahkan tidak mengerti cara menyampaikan LKPM sehingga waktu untuk datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Publik hampir tidak ada. Disamping itu pula, dengan

Ladang Porang Paman Linbat ini akan mengurangi intensitas tatap muka antara pelaku usaha dengan petugas layanan DPMPSTPTTK Kabupaten Balangan akan semakin berkurang karena proses pelaporan dilakukan pendampingan secara online. Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampinga pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja. Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal. Layanan Pendampingan LKPM Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu. Layanan pendampingan online tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu. Pelayanan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

## 1.2 Data Perubahan

Tabel 4. Data Perubahan pada inovasi LADANG PORANG PAMAN LIMBAT

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah penerima manfaat pelayanan pelaporan LKPM	Dari tahun ke tahun hasil layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan sangat membantu bagi pelaku usaha (investor) dalam proses pelaporan. Penerima manfaat pengawasan LKPM adalah sebanyak 58 perusahaan. Pelaku usaha yang melaporkan LKPM tahun 2021 terdiri dari PMA dan PMDN adalah sebanyak 39 pelaku usaha dengan nilai investasi Rp.115.122.788.614,-. Sementara itu pelaku usaha yang melaporkan LKPM tahun 2022 terdiri dari PMA dan PMDN adalah sebanyak 44 pelaku usaha dengan nilai investasi Rp.403.601.380.621,-
Metode pelaporan	Sebelumnya pelaku usaha/ investor untuk mendapatkan informasi dan penyelesaian atas permasalahann yang dihadapi dalam proses pelaporan Kegiatan Penanaman Modal dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaporan realisasi LKPM masih dilakukan secara manual, berkoordinasi dengan petugas penyelenggara pelayanan melalui tatap muka. Inovasi Ladang Porang Paman Limbat memberikan kemudahan yakni menggunakan WA bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan maupun yang telah mendaftarkan LKPM izin usahanya melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i> atau perizinan berusaha secara elektronik atau juga yang sekarang ini pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) melalui acount pelaku usaha.
Nilai SKM Pelayanan perizinan dan penanaman modal	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap 50 jenis pelayanan DPMPSTPTTK adalah 88,50 dengan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan “sangat baik”. Secara keseluruhan nilai IKM ini terlihat dari nilai unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ruang pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan, telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan yang

Indikator	Deskripsi Perubahan
	baik, ruang membaca, dan plakat-plakat informasi mengenai pelayanan, air minum gratis, serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.
Nilai investasi Kabupaten Balangan tahun 2021 dan 2022	Pertumbuhan nilai investasi dengan kondisi awal tahun 2020 adalah sebesar 216,47 Milyar, tahun 2021 sempat mengalami penurunan/ tidak bisa mencapai target investasi dari yang ditargetkan 227,29 Milyar baru tercapai 115,12 Milyar. Namun di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan menjadi 403,60 Milyar, hal ini tidak terlepas dari kemudahan pelayanan perizinan, termasuk pelaporan LKPM secara online sehingga data pelaporan penanaman modal lebih cepat diperoleh dan disajikan.
Jumlah SDM yang terlibat di dalam pelayanan	Sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan Inovasi “Ladang Porang Paman Linbat” ini adalah help desk sekaligus admin penanaman modal, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan juga pelaku usaha (investor) yang menerima pelayanan dan beinvestasi di Kabupaten Balangan
Efisiensi biaya, waktu	Masyarakat atau para pelaku usaha tidak perlu lagi datang secara tatap muka ke dinas dalam melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal setiap periode, cukup melaporkan melalui whatsapp, sehingga terjadi penghematan biaya transportasi. Sementara itu efisiensi waktu diukur dari waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan yakni dari tahapan permohonan langsung sampai dengan menunggu persetujuan BKPM dan selesai yakni selama 4 jam 15 menit, konsumsi waktu tersebut dinilai relatif cepat/ singkat dan efisien.
Meningkatnya Kinerja penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	Capaian kinerja DPMPTSPPTK tahun 2021 adalah 86,59 (sangat tinggi) mengalami peningkatan di tahun 2022 realisasi capaian kinerja menjadi sebesar 93,52% (sangat tinggi) sehingga di tahun selanjutnya dilakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor; menetapkan SOP untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas termasuk pelaporan LKPM

*Sumber: Hasil Analisis, tahun 2022*

### 1.3 Analisis Dampak

Tahapan kerja/ operasional inovasi layanan pendampingan LADANG PORANG PAMAN LIMBAT adalah sebagai berikut:

1. Pemohon langsung menghubungi nomor WA operator atau tenaga pelayanan melalui nomor WA 085249678611 dan 082120566633.
2. Pelaku usaha menyampaikan kendala atau masalah terkait LKPM yang akan disampaikan atau dilaporkan.

3. Petugas operator atau tenaga pelayanan meminta data dari pelaku usaha berupa identitas diri pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penyampaian LKPM.
4. Proses pendampingan penyampaian LKPM dibantu oleh petugas operator.
5. Input data-data yang dibutuhkan dalam penyampaian LKPM di setiap KBLI.
6. Kirim LKPM.
7. Menunggu Persetujuan dari BKPM dan selesai.

Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara online memiliki dampak dan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha. Berikut adalah beberapa dampak dan manfaatnya :

1. Pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dan melakukan pelaporan secara konvensional/ manual. Pelaporan online memungkinkan proses yang lebih cepat, dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang relevan dalam bentuk digital melalui whatsapp.
2. Pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp memungkinkan pelaku usaha untuk dengan mudah berkomunikasi dengan instansi terkait yang membutuhkan laporan tersebut. Tidak diperlukan pertemuan tatap muka yang memakan waktu, sehingga mempermudah aksesibilitas dan komunikasi antara pelaku usaha dan instansi pemerintah.
3. Dengan pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp, pelaku usaha dapat mengurangi biaya cetak dan pengiriman dokumen secara fisik. Selain itu, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau biaya administrasi tambahan terkait pelaporan konvensional. Hal ini dapat memberikan efisiensi dan penghematan biaya bagi pelaku usaha.
4. Pelaporan LKPM melalui whatsapp memungkinkan pelaku usaha untuk mengirimkan dokumen-dokumen dengan cepat dan langsung kepada pihak yang berwenang. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan dokumen selama proses pengiriman yang konvensional. Dengan adanya pelaporan online, instansi terkait juga dapat memproses laporan dengan lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan.
5. Melalui pelaporan LKPM secara online, data dan informasi yang terkait dengan penanaman modal dapat lebih mudah diakses dan diverifikasi oleh instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan usaha, serta memfasilitasi pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif.

Namun demikian, perlu diingat bahwa pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp juga dapat memiliki tantangan dan batasan tertentu terkait keamanan data, privasi, dan autentikasi. Oleh



karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka mengikuti pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait serta menjaga keamanan informasi yang sensitif.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi inovasi pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp, selain dengan melihat data perubahan tersebut diatas, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, beberapa langkah lain yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria/ indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur sebelum implementasi dilakukan. Misalnya, peningkatan efisiensi waktu dalam pelaporan, pengurangan biaya administrasi, peningkatan keakuratan data, peningkatan kepuasan pelaku usaha, atau peningkatan aksesibilitas.
2. Melakukan pemetaan dan pengumpulan data awal sebelum implementasi dimulai. Dapatkan data baseline terkait dengan metrik yang ditetapkan sebelumnya, seperti waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan konvensional/ manual, biaya administrasi yang dikeluarkan, atau tingkat keakuratan laporan.
3. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi. Lakukan wawancara, survei, atau fokus grup dengan pelaku usaha yang menggunakan inovasi ini untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mereka. Selain itu, analisis data kuantitatif seperti pengurangan waktu pelaporan atau pengurangan biaya dapat memberikan gambaran tentang dampak positif yang telah dicapai.
4. Membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Perhatikan apakah inovasi pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan dalam hal efisiensi waktu, biaya, akurasi, atau kepuasan pelaku usaha.
5. Melakukan evaluasi sejauh mana pelaku usaha mengadopsi inovasi ini dan seberapa baik mereka menggunakannya. Analisis penggunaan dapat mencakup metrik seperti jumlah laporan yang masuk melalui whatsapp, frekuensi penggunaan, atau tingkat partisipasi.
6. Menggali feedback langsung dari pelaku usaha yang menggunakan inovasi pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, pertemuan evaluasi, atau mekanisme SKM lainnya, untuk mendapatkan perspektif pengguna inovasi tentang kelebihan, kekurangan, dan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi ini.
7. Setelah memperoleh *feedback*, dilakukan pemeriksaan keakuratan dan kualitas laporan yang diterima melalui whatsapp. Identifikasi apakah ada peningkatan dalam hal akurasi data dan kualitas laporan yang diterima dibandingkan dengan metode pelaporan sebelumnya.

8. Bahan tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk temuan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Identifikasi area yang perlu diperbaiki dan cari solusi yang sesuai. Bekerja sama dengan pelaku usaha dan tim terkait untuk mengimplementasikan perbaikan ini.
9. Pemantauan secara kontinyu/ berkelanjutan dan evaluasi setelah implementasi selesai. Perbarui ukuran keberhasilan dan terus memantau dampak jangka panjang dari inovasi ini.

Di dalam implementasi inovasi pelaporan LKPM secara online kemungkinan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan, antara lain:

1. Keamanan Data: WhatsApp mungkin tidak menyediakan tingkat keamanan yang memadai untuk data bisnis sensitif. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menjadi perhatian utama dalam pelaporan online melalui platform tersebut. Penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang tepat diambil, seperti penggunaan enkripsi data dan pengaturan akses yang terbatas.
2. Data laporan perlu dilakukan validasi/ pengabsahan memastikan laporan yang diterima berasal dari pelaku usaha yang sah dan terverifikasi dapat menjadi tantangan. Proses autentikasi yang kuat dan mekanisme identifikasi yang tepat harus diterapkan untuk mencegah penipuan atau penggunaan identitas palsu.
3. Whatsapp memiliki batasan kapasitas pengiriman dan penyimpanan data. Jika dokumen-dokumen yang dikirim melalui whatsapp memiliki ukuran yang besar atau ada batasan pada jumlah dokumen yang dapat dikirimkan, hal ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi pelaporan LKPM secara online melalui platform tersebut.
4. Pelaporan LKPM online memiliki ketergantungan koneksi internet yang stabil dan andal. Jika koneksi internet tidak konsisten atau terputus, pelaku usaha mungkin menghadapi kesulitan dalam mengirimkan laporan secara tepat waktu atau bahkan kehilangan data yang telah dikirim.
5. Dalam menggunakan platform digital, kemungkinan terjadi masalah teknis (kegagalan sistem, kesalahan aplikasi, atau gangguan server). Ini dapat mengakibatkan penundaan atau kegagalan dalam pengiriman laporan LKPM. Pelaku usaha perlu memiliki rencana pemulihan kegagalan dan dukungan teknis yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
6. Implementasi inovasi bersifat digital memerlukan tingkat penerimaan yang tinggi dari pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan aplikasi whatsapp dengan benar dan efektif dalam konteks pelaporan

LKPM. Pelatihan dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara maksimal.

7. Dalam menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, penting bagi pelaku usaha dan instansi terkait untuk bekerja sama guna mengatasi hambatan dan memastikan implementasi inovasi pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp berjalan dengan lancar dan efisien.

Untuk mengatasi kendala implementasi inovasi pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Menyusun pedoman/ panduan teknis dan langkah yang jelas terkait dengan pelaporan LKPM secara online melalui whatsapp. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah keamanan data, prosedur autentikasi, penggunaan yang benar dari platform whatsapp, serta batasan teknis yang harus diperhatikan.
2. Penggunaan fitur keamanan yang disediakan oleh whatsapp, seperti enkripsi end-to-end, untuk melindungi data yang dikirimkan. Selain itu, pertimbangkan penggunaan platform tambahan yang mungkin menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi, seperti VPN (Virtual Private Network), jika diperlukan.
3. Menerapkan proses autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa laporan yang diterima berasal dari pelaku usaha yang sah. Misalnya dengan menggunakan nomor telepon yang terdaftar secara resmi oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi pengirim laporan.
4. Melakukan monitoring koneksi internet, guna memastikan koneksi internet yang digunakan stabil dan andal. Jika koneksi internet menjadi kendala, pertimbangkan penggunaan jaringan backup atau pemulihan otomatis yang dapat beralih ke sumber internet alternatif jika terjadi gangguan.
5. Lakukan backup secara teratur untuk melindungi data yang dikirim melalui whatsapp. Selain itu, sediakan mekanisme pemulihan data yang efektif jika terjadi kehilangan atau kerusakan data yang tak terduga.
6. Pastikan ada tim atau sumber daya yang siap membantu pelaku usaha dalam menangani masalah teknis yang mungkin terjadi selama proses pelaporan. Berikan pelatihan dan bimbingan yang memadai kepada pengguna agar mereka dapat menggunakan whatsapp dengan benar dan efektif.
7. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan cara menggunakan online untuk pelaporan LKPM. Berikan panduan langkah demi langkah dan sumber daya yang berguna agar pengguna merasa nyaman dengan inovasi ini.

8. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi inovasi pelaporan LKPM secara online. Identifikasi kendala yang muncul dan perbarui kebijakan, prosedur, dan sistem yang relevan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan yang memadai, kendala implementasi inovasi pendampingan pelaporan LKPM secara online dapat diatasi secara efektif, memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan manfaat pelaporan online dengan lebih baik.

## 2. JEMPUT, KUNJUNGI DAN AWASI, TERAPI OBAT PASIEN JIWA (JUKUNG SITEPAT PANJI)

### 2.1 Deskripsi Inovasi

Menurut Data dari WHO Tahun 2017 bahwa penyakit akibat gangguan jiwa adalah 2,463 per 100.000 penduduk, dan berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 didapatkan data ODGJ Berat adalah 1,8 per 1.000 penduduk atau 429.332 ODGJ Berat. Masih adanya ODGJ Berat yang dipasung yakni 31,5 % dari jumlah sementara ODGJ yang teratur minum obatnya 48,9 %, adanya Depresi pada usia > 15 tahun adalah 6,1 per 100.000 penduduk dan gangguan mental emosional adalah 9,8 per 100.000 penduduk, sehingga sangat penting untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian serta perencanaan obat gangguan jiwa.

Berdasarkan data jumlah Kunjungan Pasien jiwa di Puskesmas dan Jumlah Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ ) Berat Tahun 2021 di Puskesmas Rawat Inap Halong terdapat lebih dari 50 orang Pasien ODGJ Berat yang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar tetapi mereka tidak rutin berobat, dan masih adanya Pasien ODGJ Berat yang putus obat, berobat tidak teratur sehingga mengalami kekambuhan.

Hal ini dikarenakan tidak adanya kunjungan rumah, kurangnya pemantuan/ pengawasan minum obat, kurangnya edukasi dan konseling kesehatan jiwa sehingga pengobatan jiwa dan proses kesembuhan pasien menjadi lambat, tidak sesuai standar dan terjadi putus obat/ kekambuhan. Adanya keterbatasan sarana transportasi pada keluarga pasien, dan kurangnya dukungan keluarga/ masyarakat terhadap ODGJ atau pasien jiwa yang dianggap oleh masyarakat yakni bisa mengganggu ataupun meresahkan warga. Selain itu masih adanya pasien ODGJ yang dipasung sehingga melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dan ODGJ terlantar.

Hal ini lah yang melatar belakangi Inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI, agar kondisi Kesehatan Jiwa pasien dan pengobatan/ terapi obat jiwa bisa terkontrol, terpantau, terawasi dan bagi Pasien Gangguan Jiwa/ ODGJ yang memerlukan perawatan lebih lanjut bisa dilakukan penjemputan oleh pihak tenaga kesehatan puskesmas untuk diberikan tindakan lebih lanjut seperti dirujuk ke RSUD Balangan maupun RSJ Sambang Lihum maupun RS terdekat lainnya.

Berdasarkan data jumlah kunjungan pasien jiwa di puskesmas dan jumlah pasien ODGJ Berat Tahun 2021 di Puskesmas Rawat Inap Halong terdapat lebih dari 50 orang Pasien ODGJ Berat yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dan masih adanya Pasien ODGJ Berat yang putus obat, berobat tidak teratur sehingga mengalami kekambuhan

Metode penyelesaian masalah yang ditawarkan agar dapat memberikan pelayanan tersebut maka perlu dilakukan upaya pengobatan secara teratur di puskesmas maupun rumah Sakit, dan dilanjutkan dengan kegiatan Pemantuan Pengawasan Minum Obat melalui Kunjungan Rumah untuk

mengawasi, memantau, memberikan konseling kesehatan jiwa dan tindakan lainnya termasuk Penjemputan pasien kerumah bila diperlukan sehingga proses kesembuhan pasien dapat lebih cepat dan sesuai standar.

Hal ini lakukan karena adanya keterbatasan sarana transportasi pada keluarga pasien, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ODGJ atau pasien jiwa yang dianggap oleh masyarakat yakni bisa mengganggu ataupun meresahkan warga. Sehingga perlu dijalankan Inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI (JempUt, KUNjuNGi dan awaSI, TEraPi obAT PAsieN Jiwa , guna mengatasi hal tersebut yang diinisiasi oleh UPT. Puskesmas Rapat Inap Halong meliputi kegiatan:

- a. Jemput yaitu melakukan penjemputan pasien ODGJ berat yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke RS/ RSj seperti pasien yang terpasung, pasien yang mengalami kekambuhan, agresif
- b. Kunjungi yaitu melakukan kunjungan rumah (edukasi kesehatan, konseling kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan tindakan sesuai instruksi atau indikasi medis)
- c. Awasi terapi obat pasien jiwa yaitu melakukan pengawasan minum obat, pemantauan dalam terapi obat jiwa agar diminum dan berobat secara teratur sesuai standar.

Manfaat dan dampak hilir yang diperoleh dari implementasi JUKUNG SI TEPAT PANJI adalah sebagai berikut :

1. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan jiwa yaitu penanganan orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ ) Berat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong.
2. Meningkatkan target capaian program kesehatan jiwa sesuai standar pelayanan minimal.
3. Untuk mencegah terjadinya kekambuhan penyakit gangguan jiwa akibat pasien berobat kurang teratur dan sesuai standar melalui kunjungan rumah dan pengawasan minum obat pasien jiwa serta konseling kesehatan jiwa.
4. Menjalin kerjasama dan sinergisitas dengan seluruh sektor terkait dalam penanganan ODGJ Berat dimasyarakat.

## 2.2 Data Perubahan

Tabel 5. Perubahan Inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah penerima manfaat kegiatan inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI	Data dari Puskesmas Halong menyatakan bahwa dari 15.278 jumlah penduduk Kecamatan Halong terdapat ODGJ berat sebanyak 55 orang yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan jiwa, di semua desa terdapat pasien ODGJ berat, dengan jumlah terbanyak dari Desa Halong sebanyak 9 orang. Jumlah pengguna inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebanyak 156 orang
Penurunan jumlah ODGJ Kabupaten Balangan	Melalui pelayanan penjemputan, kunjungan dan pengawasan terhadap pemberian obat ODGJ dapat meminimalkan resiko

Indikator	Deskripsi Perubahan
	menjadi ODGJ berat. Dapat diinformasikan bahwa tahun 2021 jumlah ODGJ di Kabupaten Balangan adalah sebanyak 353 kasus, sedangkan di tahun 2022 adalah sebanyak
Kinerja	<p>Pada sistem lama pelayanan pasif yakni menunggu pasien berkunjung untuk mendapatkan pengobatan jiwa, tidak ada kunjungan untuk pengawasan minum obat, memberikan edukasi atau penjemputan pasien masih terbatas</p> <p>Pada sistem baru dilakukan pelayanan penjemputan pasien ODGJ berat yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke RS/RSj seperti pasien terpasung, kekambuhan dan agresif; melakukan kunjungan rumah guna edukasi kesehatan, konseling kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan tindakan sesuai instruksi/ indikasi medis; melakukan pengawasan minum obat, pemantauan dalam terapi obat jiwa agar diminum sesuai standar.</p>
Informasi	<p>Mekanisme lama/ manual mengharuskan pasien ODGJ Berat dan keluarganya yang ingin mendapatkan layanan Kesehatan Jiwa, datang secara langsung ke Puskesmas sehingga memerlukan biaya perjalanan.</p> <p>JUKUNG SI TEPAT PANJI memberikan Informasi pelayanan ODGJ berat dan keluarganya melalui Instagram, whatsapp dan media berita (Metro Kalimantan) maupun Informasi langsung tentang edukasi kesehatan jiwa, konseling jiwa dan informasi obat jiwa</p>
Efisiensi ekonomi dan waktu	<p>Pada mekanisme inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI pasien ODGJ berat dan keluarganya yang ingin mendapatkan layanan mudah untuk mendapatkan layanan Kesehatan Jiwa melalui nomor whatsapp sehingga sangat memudahkan dan efisien untuk pasien. Efisiensi waktu juga terjadi, dibuktikan dengan SOP waktu yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan dari adanya informasi (langsung/ buku kunjungan) → persiapan koordinasi tim, alat dan bahan → keberangkatan menuju lokasi sasaran JUKUNG SI TEPAT PANJI → penjemputan/ kunjungan rumah membutuhkan → pelaporan membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan relatif singkat, sehingga dinilai efisien dari aspek waktu.</p>
Kontrol/ pengendalian	<p>Pada cara lama/ manual pasien ODGJ berat yang berobat ke puskesmas tidak mendapatkan nomor kontak yang bisa dihubungi, tidak ada kunjungan rumah sehingga kurang adanya kontrol. Melalui inovasi JUKUNG SITEPAT PANJI pasien ODGJ berat dan keluarganya yang mendapatkan layanan mendapatkan kunjungan rumah dan pengawasan minum obat pada saat itu juga diberi nomor whatsapp sehingga jika ada yang ditanyakan dan masih kurang jelas bias langsung bertanya sehingga lebih terkontrol dan terapi obat dapat tercapai sesuai standard.</p>
Pelayanan/ service	<p>Sebelumnya layanan hanya mencakup penerimaan resep dan pemberian informasi obat pasien yang berobat saja. Pada mekanisme baru pasien ODGJ berat dan keluarganya yang mendapatkan layanan JUKUNG SI TEPAT PANJI meliputi penjemputan, kunjungan rumah (edukasi, konseling dan tindakan kesehatan) dan Pengawasan/ Pemantauan terapi obat pasien jiwa</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### **2.3 Analisis Dampak**

Inovasi JUKUNG SI TPAT PANJI yakni melakukan jemput, kunjungi, dan awasi terapi obat bagi pasien jiwa ODGJ dapat memberikan beberapa manfaat signifikan dalam perawatan dan dukungan bagi pasien tersebut. Berikut adalah beberapa manfaat yang mungkin diberikan oleh inovasi ini :

#### **1. Peningkatan Kepatuhan Pengobatan**

Implementasi inovasi tersebut memungkinkan pasien ODGJ tetap patuh terhadap rencana terapi obat mereka. Kunjungan rutin dan pengawasan langsung dapat membantu memastikan bahwa pasien mengonsumsi obat sesuai dengan jadwal dan dosis yang tepat.

#### **2. Pengawasan Efek Samping dan Kekambuhan**

Dalam proses kunjungan dan pengawasan, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat secara aktif memantau efek samping dari obat yang dikonsumsi pasien. Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan jika ada efek samping yang berbahaya atau mengganggu. Selain itu, perawatan yang lebih intensif dan pengawasan rutin juga dapat membantu mencegah kekambuhan kondisi pasien.

#### **3. Personalisasi Rencana Perawatan**

Melalui interaksi langsung dengan pasien, tenaga kesehatan dapat lebih memahami kebutuhan dan kondisi unik setiap pasien. Hal ini memungkinkan penyusunan rencana perawatan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien ODGJ.

#### **4. Meningkatkan Kualitas Hidup**

Dengan mendapatkan perawatan teratur dan efektif melalui inovasi jemput, kunjungi, dan awasi, pasien ODGJ dapat mengalami peningkatan dalam kualitas hidup mereka. Terapi obat yang tepat dapat membantu mengelola gejala dan mengurangi dampak negatif gangguan jiwa pada kehidupan sehari-hari.

#### **5. Pengenalan Dini Perubahan Perilaku**

Dalam kunjungan rutin, tenaga medis dapat mengidentifikasi perubahan perilaku atau gejala yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut atau penyesuaian dalam rencana perawatan. Dengan mendeteksi perubahan dini, tindakan dapat diambil untuk mencegah eskalasi masalah.

#### **6. Mendukung Keterlibatan Keluarga**

Melalui inovasi ini, keluarga atau pendamping dekat pasien juga dapat lebih terlibat dalam proses perawatan. Keluarga dapat mendapatkan informasi dan bimbingan mengenai cara terbaik mendukung pasien dan membantu memantau kepatuhan terapi obat.

#### **7. Reduksi Stigma dan Dukungan Emosional**



Inovasi ini juga dapat membantu mengurangi stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental. Dengan menyediakan perawatan di lingkungan yang lebih akrab dan mendukung, pasien ODGJ dapat merasa lebih nyaman dan lebih menerima bantuan untuk pemulihan mereka.

#### **8. Pencegahan Keadaan Darurat**

Dengan memberikan perawatan teratur dan pengawasan, inovasi ini dapat membantu mencegah keadaan darurat dan krisis kesehatan mental pada pasien ODGJ. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera diri atau risiko bagi orang lain.

Dengan mengoptimalkan inovasi jemput, kunjungi, dan awasi terapi obat ini, diharapkan pasien ODGJ dapat mengalami peningkatan kualitas hidup, memperoleh perawatan yang lebih terpersonalisasi, dan menghadapi masalah kesehatan mental mereka dengan dukungan yang tepat.

Mengukur keberhasilan inovasi jemput, kunjungi, dan awasi, terapi obat pasien jiwa/Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengukur keberhasilan inovasi tersebut:

- a. Kepatuhan pengobatan, yakni dengan mengukur tingkat kepatuhan pasien dalam mengikuti rencana terapi obat mereka setelah diterapkan inovasi jemput, kunjungi, dan awasi. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan catatan medis pasien, serta wawancara atau kuesioner dengan pasien dan keluarga mereka.
- b. Tingkat keterlibatan pasien, yakni dengan melakukan evaluasi tingkat keterlibatan dan partisipasi pasien dalam proses perawatan mereka. Pertimbangkan apakah pasien aktif berpartisipasi dalam sesi terapi, menghadiri pertemuan atau lokakarya dukungan, atau terlibat dalam program pemulihan lainnya yang ditawarkan.
- c. Mengukur perubahan dalam kualitas hidup pasien setelah menerapkan inovasi ini. Misalnya adanya peningkatan dalam kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional.
- d. Memantau tingkat kekambuhan pasien setelah menerapkan inovasi ini, dan mengukur perubahan dalam durasi rawat inap pasien di rumah sakit akibat adanya inovasi yang lebih efektif dalam pengawasan dan terapi.
- e. Evaluasi apakah implementasi inovasi telah membantu mengurangi jumlah krisis dan keadaan darurat yang dialami oleh pasien ODGJ, seperti upaya bunuh diri atau perilaku berbahaya lainnya/ atau terjadi pengurangan kondisi krisis dan darurat pada pasien ODGJ
- f. Mengidentifikasi tingkat keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien setelah inovasi ini diterapkan. Keluarga yang mendukung dapat berkontribusi pada kesuksesan perawatan dan pemulihan pasien.

- g. Dengan melakukan survei atau wawancara untuk mengukur perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap ODGJ setelah diterapkan inovasi ini yang menggambarkan perubahan stigma sosial terhadap kondisi kesehatan mental menjadi ke arah positif
- h. Perlunya melakukan self asesmen terhadap pasien ODGJ selain dari screening, untuk mendapatkan umpan balik dari pasien secara langsung tentang pengalaman mereka dengan inovasi ini. Ini dapat dilakukan melalui kuesioner atau diskusi terstruktur untuk memahami pandangan dan perasaan mereka terhadap program tersebut.
- i. Efisiensi dan efektivitas, yakni meninjau sejauh mana inovasi ini telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan mental bagi ODGJ. Evaluasi terhadap biaya, sumber daya, dan hasil perawatan dapat membantu mengukur keberhasilan inovasi secara keseluruhan.
- j. Menggali umpan balik dari tenaga medis dan kesehatan yang terlibat dalam memberikan layanan ini. Tinjau perspektif mereka tentang efektivitas inovasi dan apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan.

Ingatlah bahwa mengukur keberhasilan inovasi ini memerlukan waktu dan data yang cukup untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Penting untuk terus melakukan evaluasi secara berkala dan menggabungkan hasil evaluasi dengan umpan balik dari pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan inovasi dan memberikan perawatan terbaik bagi pasien ODGJ.

Beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI adalah sebagai berikut:

1. Inovasi ini mungkin memerlukan sumber daya tambahan, seperti personel medis, kendaraan, dan peralatan, untuk melakukan kegiatan penjemputan, kunjungan rumah dan edukasi serta pengawasan. Tersedianya logistik dan sumber daya yang memadai menjadi penting untuk menghadapi tantangan ini.
2. Implementasi JUKUNG SI TEPAT PANJI dapat menjadi mahal karena melibatkan kunjungan rumah dan pengawasan yang teratur. Institusi atau organisasi perawatan kesehatan perlu mempertimbangkan anggaran yang memadai untuk menjalankan program ini dengan efektif.
3. Kendala ketersediaan tenaga medis dan kesehatan yang cukup dan terlatih menjadi kunci dalam kesuksesan inovasi ini. Terbatasnya jumlah profesional medis atau tenaga kesehatan yang terlatih dapat menjadi kendala dalam memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi.
4. Kendala kesulitan dalam koordinasi dengan fasilitas kesehatan, dimana dalam implementasi program inovasi membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang melakukan kunjungan

rumah dan tim medis atau fasilitas kesehatan tempat pasien biasanya dirawat. Koordinasi yang efektif perlu dilakukan untuk memastikan informasi dan data pasien terintegrasi dengan baik.

5. Masalah keamanan, pada beberapa pasien ODGJ mungkin mengalami perilaku yang berpotensi berbahaya atau agresif. Dalam kunjungan rumah, perlu diantisipasi dan dipersiapkan untuk menghadapi situasi keamanan yang mungkin muncul.
6. Kendala keterbatasan kondisi geografis, dimana terdapat kondisi pasien ODGJ berada di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil, implementasi inovasi ini dapat menghadapi tantangan dalam mengatur kunjungan rutin dan pengawasan yang efektif.
7. Kendala faktor sosial dan stigma, diharapkan inovasi dapat mengatasi faktor sosial dan stigma yang terkait dengan kesehatan mental. Stigma sosial terhadap ODGJ dapat mempengaruhi partisipasi pasien dan keluarga dalam program ini, dengan pendampingan dan pemberian edukasi kepada masyarakat.
8. Potensi terjadinya masalah kompleksitas gangguan jiwa. Pasien ODGJ seringkali memiliki kebutuhan kesehatan yang kompleks dan beragam. Mengelola dan mengawasi terapi obat untuk kondisi ini dapat menjadi tantangan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus.
9. Keberhasilan inovasi ini juga bergantung pada tingkat keterlibatan pasien dalam proses perawatan mereka. Jika pasien kurang terlibat atau tidak mau mengikuti rencana perawatan, hal ini dapat mempengaruhi hasil dan efektivitas inovasi.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, penting bagi organisasi dan tim kesehatan untuk melakukan perencanaan yang cermat, mengidentifikasi solusi yang sesuai, dan terus mengembangkan dan memperbaiki proses implementasi inovasi jemput, kunjungi, dan awasi terapi obat untuk ODGJ. Dengan pengelolaan yang efektif, inovasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasien dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan mental.

Mengatasi permasalahan dan kendala implementasi inovasi jemput, kunjungi, dan awasi terapi obat pasien jiwa/Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Menyusun perencanaan yang matang dan teliti sebelum memulai implementasi inovasi ini. Identifikasi semua kemungkinan kendala yang mungkin muncul dan buat rencana tindakan yang jelas untuk mengahadapinya. Pertimbangkan aspek logistik, sumber daya, anggaran, dan personel yang diperlukan dengan cermat.
2. Menetapkan alur kerja yang terstruktur dan jelas untuk implementasi inovasi ini. Koordinasi antara tim yang melakukan jemput, kunjungi, dan awasi dengan tim medis atau fasilitas

kesehatan perlu diatur dengan baik untuk memastikan informasi dan data pasien terintegrasi dengan baik.

3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tim inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI (tenaga kesehatan) yang terlibat dalam implementasi agar memiliki pelatihan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan tambahan tentang perawatan ODGJ, manajemen keamanan, dan komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang mungkin muncul.
4. Berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan lain, yakni menjalin kerjasama kuat dengan fasilitas kesehatan lain yang merawat pasien ODGJ. Komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi yang teratur akan membantu memastikan perawatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Penggunaan/ memanfaatkan teknologi dan telemedicine untuk mendukung implementasi inovasi ini. Dalam hal ini adalah penggunaan aplikasi atau platform digital untuk jadwal kunjungan, pengingat obat, atau monitoring kepatuhan dapat membantu mengatasi beberapa kendala logistik dan sumber daya.
6. Mengedukasi dan memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat untuk mengendalikan mengatasi stigma sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa sangat penting. Melakukan kampanye edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan memperkuat dukungan dari masyarakat untuk inovasi ini.
7. Melakukan pendekatan individualisasi kepada setiap pasien ODGJ, karena kecenderungan mereka memiliki kebutuhan yang unik. Dengan pendekatan individualisasi, tim kesehatan dapat mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh setiap pasien dan mencari solusi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
8. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi inovasi ini. Identifikasi keberhasilan dan hambatan yang muncul selama proses dan lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
9. Meningkatkan dukungan keluarga dan lingkungan dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial pasien sebagai mitra dalam perawatan ODGJ dapat membantu mengatasi beberapa kendala. Dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan dan pemahaman tentang perawatan pasien.
10. Meningkatkan dan memastikan kesadaran dan komitmen institusi yang kuat terhadap implementasi inovasi ini. Dukungan dari pimpinan dan pengambil keputusan akan memudahkan pemecahan kendala dan perubahan yang diperlukan dalam proses implementasi.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, inovasi JUKUNG SI TEPAT PANJI bagi pasien jiwa/ODGJ dapat berhasil diimplementasikan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam perawatan dan dukungan bagi pasien tersebut.